



RENCANA KINERJA



TAHUN

2022

DINAS PERHUBUNGAN



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah periode 11 (satu) tahun. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).

Penyusunan Rencana Kerja ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022, sehingga target penetapan RKA/DPA- SKPD Tahun 2022 dipenuhi sesuai jadwal yang disepakati antara pihak Bupati Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian rencana kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugrah dan hidayah-Nya.

Akhirulkalimat, mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kuala Tungkal, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
A. Faktor Penyebab Terpenuhinya program dan kegiatan	20
B. Implikasi terhadap capaian Program/kKegiatan	21
C. Kebijakan Dan Solusi	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	24
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	29
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program Masyarakat	39
 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran	41
3.2 Program dan Kegiatan	41
3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	44
 BAB IV KESIMPULAN	 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	11
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Melalui Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2020	25
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	31
Tabel 3.1 Target Dan PAD Tahun 2022	
Tabel 3.2 Tujuan Dan Sasaran yang Mengacu Pada RPJMD	
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2023 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2022 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2023, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global;
- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.

Dari sub agenda nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

- a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global

- c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan menjadi salah satu sub agenda prioritas nasional dengan sasaran (1) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (2) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Jalan Perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/jam (3) meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000M(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja OPD) merupakan tahapan awal dalam penyusunan Renja OPD. Renja OPD itu sendiri merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- c. Terwujudnya pencapaian visi dan misi perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi kabupaten tanjung jabung barat;
- d. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- f. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 2016-2021

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

**BAB II****HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA OPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Renja (Ranwal Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah

dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2020. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2020 telah terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Tabel 2.1 (tabel T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kefiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENDAPATAN										
	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	Retbusi Gedung PKB										
	Retribusi Terminal										
	Retribusi Kepelabuhan										
	BELANJA										
	BELANJA TIDAK LANGUSNG										
	Belanja Gaji dan Tunjangan										
	BELANJA LANGSUNG										
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	%	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
	penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	peningkatan prasarana transportasi	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jasa media cetak dan elektronik	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
Penyediaan makanan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bln	72	36	12	12	100.0%	12	60	83.33%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam	%	100	100	100	100	100.0%		200	200.00%
	Pengadaan kendaraan operasional	Jumlah Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Unit	2	1	0	0	#DIV/0!	0	1	50.00%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah terpenuhnya perlengkapan gedung kantor	Unit	79	17	0	0	#DIV/0!	0	17	21.52%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Tersedianya peralatan gedung kantor	Unit	16	9	7	7	100.0%	7	23	143.75%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	32	2	32	32	100.0%	32	66	206.25%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	Unit	5	2	2	2	100.0%	2	6	120.00%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	Unit	155	51	54	54	100.0%	54	159	102.58%
	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pakaian Dinas tersedia	%	100	100		100	#DIV/0!		200	200.00%
	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	Stel	660	389	125	125	100.0%	125	639	96.82%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan Yang tersusun tepat waktu	%	100	100		100	#DIV/0!		200	200.00%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dok	30	15	5	5	100.0%	6	26	86.67%
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Unit					#DIV/0!		0	#DIV/0!
	Kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan terminal/elabuhan	terlaksananya kegiatan pemeliharaan pelabuhan dermaga dan halte sungai	Unit	46	16	13	10	76.9%	10	36	78.26%
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase peningkatan layanan angkutan	%	100	100		100	#DIV/0!		200	200.00%
	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal dan Parkir	Terselenggaranya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Dok	10	6	2	2	100.0%	2	10	100.00%
	Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	Frekuensi Pengawasan, Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	Kali	80	48	16	16	100.0%	16	80	100.00%
	Forum lalu lintas angkutan jalan	Jumlah rapat-rapat pembahasan forum LLAJ	Kali	20	12	4	4	100.0%	4	20	100.00%
	Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	Jumlah Pengamanan Hari Besar, Nasional, Daerah dan Hut Perhubungan	Kali	40	24	8	6	75.0%	6	36	90.00%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan pelabuhan sungan dan pelabuhan penyeberangan	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Pelabuhan	Dok	10	6	2	2	100.0%	2	10	100.00%
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase menurunnya Pelanggaran Darat	%	100				#DIV/0!		0	0.00%
	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	terlaksananya operasi	kali	150	90	30	30	100.0%	30	150	100.00%
	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Tertib Kendaraan yang lulus uji	Unit	2400				#DIV/0!		0	0.00%
	uji kelaikan pengoperasian k	(uji kelaikan kendaara	Unit	10000	4020	1210	1100	90.9%	0	5120	51.20%

Kuala Tungka, Desember 2020


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SAMSUL JIHARI, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701223 199203 1 001

Pada tahun 2020 total anggaran Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar **Rp. 6.249.026.800,00** dengan rincian Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.610.177,00** dan Belanja Tidak Langsung **Rp. 2.094.257.443,00**, dan diuraikan dalam pelaksanaan **8 Program dan 24 Kegiatan**.

Evaluasi Realisasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019 melalui rincian program dan kegiatan (Belanja Langsung) tersebut meliputi :

1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran. Indikator Programnya adalah Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kab. Tanjung Jabung Barat. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar **98,3%** dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar **Rp. 508.535.979**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 474.394.295**

2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kab. Tanjung Jabung Barat.. Indikator Programnya adalah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar **98,8%** dengan target **100%** . Adapun alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar **Rp. 450.030.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 398.048.730**

3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kab. Tanjung Jabung Barat. Indikator programnya adalah jumlah pengadaan pakaian dinas. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar **0%** dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar **Rp. 0**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 0**

4) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Program ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional yang dilaksanakan dinas perhubungan Kab.

Tanjung Jabung Barat. Indikator programnya adalah Persentase Dokumen Perencanaan Yang tersusun tepat waktu. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar **98,9%** dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sebesar **Rp. 13.300.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 13.300.000**

5) **PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ**

Program ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat. Indikator Programnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara dalam Kondisi Baik. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar 20% dengan target **10 Unit**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ sebesar **Rp. 359.000.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 26.700.000**

Untuk mendukung Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ diimplementasikan dengan 1 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan dengan alokasi dana **Rp. Rp. 359.000.000** yang dialokasikan dengan **maksud** sebagai salah satu fasilitas dan informasi untuk Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. **Tujuan** dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk sebagai rumusan strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara dengan target **10 Unit**. Realisasi target adalah **10 unit** atau **100%**. Dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 26.700.000** atau **100%**.

6) **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**

Program ini dilaksanakan untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan di bidang perhubungan darat maupun laut. Indikator programnya adalah Persentase peningkatan layanan angkutan. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program

Peningkatan Pelayanan Angkutan sebesar **Rp. 1.390.873.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar

Untuk mendukung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan diimplementasikan dengan 5 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengawasann kawasan pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan dengan alokasi dana **Rp. 217.500.000**, yang dialokasikan dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pemenuhan keselamatan pelayanan dan keselamatan penumpang di bidang perhubungan laut. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelayaran. Output dari kegiatan ini adalah frekuensi pengawasan dan pengendalian sungai danau dan penyeberangan dengan target **16 kali**. Realisasi target adalah **16 kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.
- b. Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 191.300.000**, yang dialokasikan dengan maksud untuk melakukan konsultasi, koordinasi guna menciptakan sinergi antara dinas perhubungan dengan TNI dan Kepolisian satlantas. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Outpu dari kegiatan ini adalah melakukan rapat – rapat koordinasi mengenai rekayasa lalu lintas dan forum LLAJ dengan target **4 kali**. Realisasi target adalah **4 Kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.
- c. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamaan Penumpang dilingkungan Terminal dengan alokasi anggaran **Rp.599.880.000**, yang dialokasikan dengan maksud Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan darat dengan mengatur jadwal operasional, menyediakan area tunggu dan fasilitas penunjang lainnya. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan kemananan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga operasional terminal terlaksana dan tertata dengan baik. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen operasional yang tersusun dengan target **2 Dok**.

Realisasi target adalah **2 Dok** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.

- d. Kegiatan Penciptaan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan dengan alokasi anggaran **Rp. 215.355.000**, yang dialokasikan dengan Maksud Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan darat dengan mengatur jadwal operasional, menyediakan area tunggu dan fasilitas penunjang lainnya. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga operasional pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan terlaksana dan tertata dengan baik. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen operasional yang tersusun dengan target **2 Dok**. Realisasi target adalah **2 Dok** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.
- e. Kegiatan Posko Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah dengan alokasi dana **Rp. 166.838.000**, yang dialokasikan dengan maksud sebagai Peningkatan pengawasan dan pengendalian LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas pada saat pelaksanaan hari hari besar nasional dan daerah. **Tujuan** dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan optimal bagi pengguna transportasi sehingga terciptanya tertib lalu lintas angkutan jalan dan mengurangi angka kecelakaan di bidang perhubungan darat dan laut pada saat pelaksanaan hari hari nasional dan daerah. Output kegiatan ini adalah Jumlah pengamanan pelayanan posko ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan dengan target **8 Kali**. Realisasi target sebesar **8 kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.

7) PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan tertib laik uji kendaraan bermotor sehingga terciptanya tertib kendaraan yang memenuhi standar laik jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Indikator programnya adalah Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan. Adapun alokasi anggaran untuk Program

Peningkatan Kelaikan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar **Rp. 8.800.000**. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar **Rp. 8.800.000** dengan target **1.210 Unit** atau **100%**.

Untuk mendukung Program Peningkatan Kelaikan Pengujian Kendaraan Bermotor diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan alokasi dana sebesar **Rp. 8.800.000** , yang dialokasikan dengan maksud terciptanya penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. **Tujuan** dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tertib standar laik jalan angkutan pengguna transportasi sehingga dapat meningkatkan Retribusi di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Output kegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan dengan target **1.210 Unit**. Realisasi target sebesar **Unit** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.

8) **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut. Indikator programnya adalah frekuensi pengamanan, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas. Adapun alokasi anggaran untuk Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas **Rp. 666.920.000**, Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar **Rp. 666.920.000** dengan target **30 Kali** atau **100%**.

Untuk mendukung Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Operasional, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas dengan alokasi dana sebesar **Rp. 666.920.000**, yang dialokasikan dengan maksud terciptanya keamanan dan kenyamanan serta efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut. **Tujuan**

dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keselamatan kepada pengguna transportasi melalui pengaturan lalu lintas dan raija kelengkapan standar laik jalan angkutan. Output dari kegiatan ini adalah frekuensi pengamanan, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas melalui pengamanan lalu lintas angkutan jalan dengan target **30 Kali**. Realisasi target sebesar **30 Kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar **Rp. 666.920.000** atau **100%**.

a. Faktor penyebab terpenuhinya dan permasalahan tidak terpenuhinya pelaksanaan Program/kegiatan Dinas perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2020

Faktor Faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang awalnya dinas perhubungan, informatika dan komunikasi menjadi dinas perhubungan, sehingga anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) di bidang informatika dan komunikasi tidak dapat direalisasikan dan menjadi silpa, yang berpengaruh terhadap rendahnya serapan anggaran dinas perhubungan
2. Peraturan di bidang Perhubungan, baik darat dan laut memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang kadang-kadang dilapangan

menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/UPTD dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. diperlukan kebutuhan komposisi di Bidang Darat dan Laut juga yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan mengingat dua moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.
4. Pengalokasian Anggaran Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja. Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran, sedangkan indikator yang harus dicapai berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tertulis secara kuantitatif. Dengan adanya target atau angka/digit tertentu pada indikator tertentu, juga telah dapat ditentukan berapa Rupiah alokasi biaya yang diutuhkan untuk mencapainya. Namun indikator yang telah ditetapkan belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggaran pada suatu program / kegiatan yang telah ditentukan, pada priode Rencana Tahunan yang telah disusun setiap tahunnya.
5. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga dapat menjadi kendala. Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun penganggaran.

b. Implikasi yang timbul terhadap capaian program/kegiatan tahun 2020 :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jasa transportasi pada bidang darat maupun laut dengan Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.

5. Menurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan darat dan laut.
6. Meningkatnya PAD pada sektor Terminal, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Kepelabuhan
7. Meningkatnya tertib laik kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar.

c. Kebijakan/solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayahPembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor transportasi darat, sungai dan penyeberangan .
 - Indikator 1 : Persentase peningkatan retribusi pada terminal
 - Indikator 2 : Persentase peningkatan retribusi pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Indikator 3 : Persentase peningkatan retribusi pada sektor Kepelabuhan
2. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut
 - Indikator 1 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi darat
 - Indikator 2 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi laut
3. Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum
 - Indikator 1 : Persentase kendaraan yang laik jalan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam (table T-C.30) sebagai berikut :



BAB II

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA OPD TAHUN LALU**

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

TABEL T-C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022-2025

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Layanan Urusan Wajib													
7	PERHUBUNGAN												
7.1	Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Terminal	%	100		Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000			Rp 100,000,000	Rp 110,000,000	
7.2	Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Kepelabuhan	%	100		Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000			Rp 120,000,000	Rp 125,000,000	
7.3	Persentase Peningkatan Retribusi Pada Sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	%	100		Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000			Rp 160,000,000	Rp 165,000,000	
7.4	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Kasus	60		60	50	40	30	-		20	10	
7.5	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Laut	Kasus	3		3	3	3	2	0		0	0	
7.6	Persentase Kendaraan Yang Memenuhi Standar Laik Jalan	Unit	2400		2400	2500	2600	2700	2150		2200	2250	
RPJMD BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN													
1	Tersedianya Jumlah pelabuhan laut/LLASDP dan terminal bus	Unit	5		1	1	1	1	0	0	2	3	
2	Tersedianya Halte dan Dermaga Sungai Kondisi Baik	Unit	13		3	4	3	3	3	3	3	3	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN													
1. PELAYANAN ANGKUTAN JALAN													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan													
1)	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	75		75	75	75	75	98	98	98	98	
2)	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	95	95	95	95	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan													
	1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
	2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	40		40	40	40	40	38	38	38	38	
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	20
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan													
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	57.8	57.4	57.8	57.8	
d. Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor													
	1) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	%	60		60	60	60	60	27.8	20.4	21.8	27.8	
e. Sumber Daya Manusia (SDM)													
	1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	%	50		50	50	50	50	10	10	10	20	
	2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	%	100		100	100	100	100	10	10	10	20	
	3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	%	40		40	40	40	40	5	5	5	5	
	4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	%	100		100	100	100	100	10	11	12	12	
f. Keselamatan													
	1) Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	96.7	97.7	98	98.1	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

2. PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau													
	1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	76		76	76	76	76	50	50	70	75	
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	40		40	40	40	40	47	47	47	48	
b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau													
	1) Tersedianya pelabuhan sungai dandanau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	%	60		60	60	60	60	50	50	50	50	
c. Keselamatan													
	2) Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	98	98.7	98.7	98.7	
d. Sumber Daya Manusia													
	3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	%	50		50	50	50	50	47	48	48.5	48.5	
3. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan													
	1) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	58	58	58	58	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
b. Tersedianya Prasarana Angkutan Penyeberangan													
	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	%	60		60	60	60	60	50	50	50	50	
c. Keselamatan													
	1). Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	87	87	89	90	
d. Sumber Daya Manusia													
	2). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	%	50		50	50	50	50	46	48	48.5	48.5	
4. PELAYANAN ANGKUTAN LAUT													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut													
	1). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	90		90	90	90	90	88	88	88	89	

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

[illegible]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan.

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang Komunikasi dan Informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

- 1. Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:**
 - a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat;
 - b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
 - c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- 2. Permasalahan, Dampak/peluang Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap sasaran Kabupaten. Tanjung Jabung Barat**

Urusan Perhubungan**a. STRENGTHS (KEKUATAN):**

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
2. Anggaran yang kurang memadai;
3. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
4. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
5. Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.

c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.

3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
 5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.
- d. THREATS (ANCAMAN):
1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
 3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi
- e. Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :
1. kepada masyarakat dalam jangka panjang.Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
 2. Peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan peraturan perundangan sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan berpotensi adanya ketidak konsistenan perencanaan dan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;
 3. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan;
 4. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan masih lemahnya manajemen data dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;

5. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian;
6. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium penerimaan pegawai baru;
7. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
8. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
9. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman Perencanaan Pembangunan dengan membandingkan program dari pemerintah kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program untuk dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan kota.

Rancangan awal untuk RKPD Tahun 2020 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, Proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja daerah untuk 2020 sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah
2. Dukungan RPJMN 2016 – 2021 dan RKP 2018;

3. Penggunaan dana fungsi pendidikan ;
4. Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
6. Pendukungan implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja BPPPT dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 disajikan dalam Tabel T.C-31 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (tabel T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	DISHUB	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	12 Bulan	924.400.000	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	DISHUB	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	12 Bulan	924.400.000	APBD
	penyediaan jasa surat menyurat	DISHUB	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	5.400.000	penyediaan jasa surat menyurat	DISHUB	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	5.400.000	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	DISHUB	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	340.000.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	DISHUB	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	340.000.000	APBD
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	DISHUB	peningkatan prasarana transportasi	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	DISHUB	peningkatan prasarana transportasi	12 Bulan	60.000.000	APBD
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DISHUB	Tersedianya administrasi keuangan	12 Bulan	130.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DISHUB	Tersedianya administrasi keuangan	12 Bulan	130.000.000	APBD

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DISHUB	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	13.500.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DISHUB	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	13.500.000	APBD
	Penyediaan alat tulis kantor	DISHUB	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	DISHUB	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	60.000.000	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISHUB	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISHUB	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35.000.000	APBD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISHUB	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan	6.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISHUB	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	6.000.000	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	DISHUB	Tersedianya jasa media cetak dan elektronik	12 Bulan	8.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	DISHUB	Tersedianya jasa media cetak dan elektronik	12 Bulan	8.000.000	APBD
	Penyediaan makanan minuman	DISHUB	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	6.500.000	Penyediaan makanan minuman	DISHUB	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	6.500.000	APBD
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DISHUB	Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	12 Bulan	260.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DISHUB	Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 Bulan	260.000.000	APBD

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	DISHUB	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam	100%	1.211.250.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISHUB	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	1.211.250.000	APBD
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah terpenuhnya perlengkapan gedung kantor	16 Unit	106.250.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah terpenuhnya perlengkapan gedung kantor	16 Unit	106.250.000	APBD
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah Tersedianya peralatan gedung kantor	4 Unit	45.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah Tersedianya peralatan gedung kantor	4 Unit	45.000.000	APBD
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DISHUB	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	32 unit	600.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DISHUB	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	32 unit	600.000.000	APBD
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	5 unit	360.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	5 unit	360.000.000	APBD

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	54 unit	100.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	54 unit	100.000.000	APBD
	Program peningkatan disiplin aparatur	DISHUB	Jumlah Pakaian Dinas tersedia	132 stel	135.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur	DISHUB	Jumlah Pakaian Dinas tersedia	132 stel	135.000.000	APBD
	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan	DISHUB	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	132 stel	135.000.000	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan	DISHUB	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	132 stel	135.000.000	APBD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISHUB	Persentase Meningkatnya kinerja pelayanan	100%	60.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISHUB	Persentase Meningkatnya kinerja pelayanan kantor	100%	60.000.000	APBD
	Pendidikan dan pelatihan formal	DISHUB	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural	2 Orang	60.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	DISHUB	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural	2 Orang	60.000.000	APBD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	DISHUB	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang tersusun tepat waktu	6 Dok	80.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	DISHUB	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang tersusun tepat waktu	6 Dok	80.000.000	APBD
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	DISHUB	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	6 Dok	80.000.000	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	DISHUB	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	6 Dok	80.000.000	APBD

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DISHUB	Meningkatkan pelayanan halte dan dermaga sungai untuk kelancaran transportasi orang dan barang	2 Dok	160.000.000	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DISHUB	Meningkatkan pelayanan halte dan dermaga sungai untuk kelancaran transportasi orang dan barang	2 Dok	160.000.000	APBD
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kantor Dishub, UPT Sarana dan Prasarana DAN Halte Sungai	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	2 Dok	160.000.000	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kantor Dishub, UPT Sarana dan Prasarana DAN Halte Sungai	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	2 Dok	160.000.000	APBD
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	13 Unit	500.000.000	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	13 Unit	500.000.000	APBD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	terlaksananya kegiatan pemeliharaan pelabuhan dermaga dan halte sungai	13 Unit	500000000	Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	Kantor Dishub dan UPT Sarana dan Prasarana	terlaksananya kegiatan pemeliharaan pelabuhan dermaga dan halte sungai	13 Unit	500000000	APBD

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	DISHUB	Persentase peningkatan layanan keamanan kenyamanan angkutan dan penumpang	100%	1.911.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	DISHUB	Persentase peningkatan layanan keamanan kenyamanan angkutan dan penumpang	100%	1.911.000.000	APBD
Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal dan Parkir	UPT Sarana prasarana	Terselenggaranya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	2 dokumen	800.000.000	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal dan Parkir	UPT Sarana prasarana	Terselenggaranya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	2 dokumen	800.000.000	APBD
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	DISHUB	Jumlah terpilihnya sopir/juru ,mudik/awak kendaraan angkutan teladan	2 orang	50.000.000	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	DISHUB	Jumlah terpilihnya sopir/juru ,mudik/awak kendaraan angkutan teladan	2 orang	50.000.000	APBD
Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	UPT Sarana prasarana	Frekuensi Pengawasan, Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	16 Kali	321.000.000	Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	UPT Sarana prasarana	Frekuensi Pengawasan, Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	16 Kali	321.000.000	APBD
Forum lalu lintas angkutan jalan	DISHUB	Jumlah rapat-rapat pembahasan forum LLAJ	4 kali	250.000.000	Forum lalu lintas angkutan jalan	DISHUB	Jumlah rapat-rapat pembahasan forum LLAJ	4 kali	250.000.000	APBD

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

	Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	DISHUB dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah pengamanan pelayanan posko ramdhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan	8 Kali	220.000.000	Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	DISHUB dan UPT Sarana dan Prasarana	Jumlah pengamanan pelayanan posko ramdhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan	8 Kali	220.000.000	APBD
	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan pelabuhan sungan dan pelabuhan penyeberangan	UPT Sarana prasarana	Terciptanya penciptaan keamanan dan kenyamanan menjadi baik	2 Kali	270.000.000	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan pelabuhan sungan dan pelabuhan penyeberangan	UPT Sarana prasarana	Terciptanya penciptaan keamanan dan kenyamanan menjadi baik	2 Kali	270.000.000	APBD
	Program peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		Jumlah menurunnya Pelanggaran Darat	20 Kasus	1.045.000.000	Program peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		Jumlah menurunnya Pelanggaran Darat	20 Kasus	1.006.500.000	APBD
	Pengadaan Rambu lalu Lintas		Rasio Rambu terpsang (pada Titik rawan kecelakaan)	30	265.000.000	Pengadaan Rambu lalu Lintas		Rasio Rambu terpsang (pada Titik rawan kecelakaan)	30	226.500.000	APBD
			- Rambu	200				- Rambu	200		APBD
			- Marka Jalan	150				- Marka Jalan	150		APBD

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lintas	Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten	Jumlah terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	30 Kali	780.000.000	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lintas	Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten	Jumlah terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	30 Kali	780.000.000	APBD
	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	2400 Unit	140.000.000	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	2400 Unit	140.000.000	APBD
	Uji kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	UPT PKB	Jumlah kendaraan yang telah diuji	2400 Unit	140000000	Uji kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	UPT PKB	Jumlah kendaraan yang telah diuji	2400 Unit	140000000	APBD
	Jumlah				6.166.650.000		Jumlah				6.128.150.000 APBD

1.3. Penelaahan Usulan Program Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang perhubungan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Tabel T-C 32**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KAUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT****Nama OPD : Dinas Perhubungan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
-	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Halte Sungai Yang Tersedia dan Lengkap	-	-

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional****a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan**

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan,

penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan dan angkutan umum perkotaan.

c. VISI DAN MISI RPJMD

Visi RPJMD	“ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas “
Misi RPJMD :	
Misi 1	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas
Misi 2	: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
Misi 3	: meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
Misi 4	: Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 1 RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas. Dengan sasaran 1.1 yaitu Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan konektivitas

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (TABEL 3.2)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2022-2025 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2022 -2025 adalah sebagai berikut:

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 1. Penyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 1. Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan
8. Program Peningkatan Pelayanan dan Angkutan
 1. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal Dan Parkir
 2. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
 3. Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai Dan Penyeberangan
 4. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
 5. Kegiatan Posko Pengamanan Hari – Hari Besar Nasional Dan Daerah
 6. Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pelabuhan Sungai Dan Pelabuhan Penyeberangan
9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 1. Operasional Pengawasan Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

2. Pengadaan Rambu Lalu Lintas

10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Bermotor

1. Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Program Rutin terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 20 kegiatan.

b. Program Wajib terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 14 kegiatan.

Dapat di totalkan keseluruhan Setiap OPD terdiri dari program rutin dan program wajib adalah 10 program, terdiri 34 kegiatan

B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya. Indikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Program Peningkatan administrasi perkantoran;

Indikator Kinerja : Persentase kepuasan aparatur

2. Program Peningkatan sarana prasarana aparatur;

Indikator Kinerja : Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kineja : Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia

4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;

Indikator Kinerja : Prosentase sumber daya apartur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM.

5. Peningkatan pengembang sistem pelaporan capaian kinerja;

Indikator Kinerja : Nilai AKIP

6. Perencanaan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Indikator Kinerja : Prosentase kecukupan data/dok. Pengembangan transportasi

7. Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Indikator Kinerja : Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai standar

8. Peningkatan pelayanan angkutan

Indikator Kinerja : Persentase Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan sarana angkutan

9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Indikator Kinerja : jumlah Frekuensi Pengawasan, pengamanan, penertiban dan rekayasa lalu lintas

10. Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

Indikator Kinerja : Persentase Kendaraan yang memenuhi standar laik jalans

C. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas

Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel di bawah

Tabel 3.2**Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021**

No	Uraian	Target (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-
2	Retribusi Terminal	Rp. 80.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Rp. 150.000.000,00
	Jumlah	

Tabel 3.1 (table T-C.33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

Tabel T.C.33
Rencana Program Kegiatan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2023		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Lokasi	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber dana		Target	Pagu Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1 Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota/ 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	Dishub	100%	Rp 8.739.490.435	APBD		100%	Rp 8.790.536.945	Dishub
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	Dishub	16	Rp 77.000.000	APBD		16	Rp 76.500.000	Dishub
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	4	Rp 12.000.000	APBD		4	Rp 12.000.000	Dishub

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	APBD		1	Rp	5.000.000	Dishub
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	APBD		1	Rp	5.000.000	Dishub
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	APBD		1	Rp	4.500.000	Dishub
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	APBD		1	Rp	5.000.000	Dishub

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Dishub	3	Rp 20.000.000	APBD		3	Rp 20.000.000	Dishub
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Dishub	5	Rp 25.000.000	APBD		5	Rp 25.000.000	Dishub
			Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	Laporan	Dishub	100%	Rp 5.185.000.000	APBD		100%	Rp 5.185.000.000	Dishub
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/O rang	Dishub	12/30	Rp 5.000.000.000	APBD		12/30	Rp 5.000.000.000	Dishub
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokume n	Dishub	2	Rp 180.000.000	APBD		2	Rp 180.000.000	Dishub

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Dishub	1	Rp 5.000.000	APBD		1	Rp 5.000.000	Dishub
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	%	Dishub	100%	Rp 160.000.000	APBD		100%	Rp 210.000.000	Dishub
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp 5.000.000	APBD		1	Rp 5.000.000	Dishub
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	8	Rp 150.000.000	APBD		8	Rp 200.000.000	Dishub
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Dishub	1	Rp 5.000.000	APBD		1	Rp 5.000.000	Dishub
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	Dishub	134	Rp 255.000.000	APBD		134	Rp 255.000.000	Dishub

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Dishub	132	Rp 195.000.000	APBD		132	Rp 195.000.000	Dishub
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Dishub	2	Rp 60.000.000	APBD		2	Rp 60.000.000	Dishub
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Prangkat Daerah	%	Dishub	100%	Rp 571.590.434	APBD		100%	Rp 582.044.110	Dishub
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	210	Rp 4.990.434	APBD		210	Rp 5.444.110	Dishub
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Dishub	17	Rp 75.000.000	APBD		16	Rp 70.000.000	Dishub
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp 25.000.000	APBD		12	Rp 25.000.000	Dishub
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	800	Rp 25.000.000	APBD		800	Rp 25.000.000	Dishub

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp 85.000.000	APBD		12	Rp 90.000.000	Dishub
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dishub	12	Rp 6.600.000	APBD		12	Rp 6.600.000	Dishub
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Dishub	12	Rp 350.000.000	APBD		12	Rp 360.000.000	Dishub
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	Dishub	28	Rp 1.300.000.000	APBD		26	Rp 1.225.000.000	Dishub
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Dishub	2	Rp 50.000.000	APBD		0	Rp -	

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Dishub	2	Rp 950.000.000	APBD		2	Rp 950.000.000	Dishub
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Dishub	10	Rp 50.000.000	APBD		10	Rp 50.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	1	Rp 75.000.000	APBD		1	Rp 50.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	10	Rp 100.000.000	APBD		10	Rp 100.000.000	Dishub
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	3	Rp 75.000.000	APBD		3	Rp 75.000.000	Dishub
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	Dishub	12	Rp 120.208.781	APBD		12	Rp 140.320.596	Dishub

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Dishub	1	Rp 1.316.185	APBD		12	Rp 1.428.000	Dishub
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp 100.000.000	APBD		1	Rp 120.000.000	Dishub
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp 18.892.596	APBD		1	Rp 18.892.596	Dishub
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/ken- daraan Kantor Kondisi Baik	Unit	Dishub	95	Rp 1.070.691.220	APBD		95	Rp 1.116.672.240	Dishub
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Dishub	2	Rp 200.000.000	APBD		2	Rp 200.000.000	Dishub

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Dishub	32	Rp 487.025.000	APBD		32	Rp 531.300.000	Dishub
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Dishub	54	Rp 28.666.220	APBD		54	Rp 30.372.240	Rp -
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Dishub	7	Rp 355.000.000	APBD		7	Rp 355.000.000	Dishub
	Sasaran 5.1.2 Memperkuat konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan		PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	Dishub	100%	Rp 3.848.000.000	APBD		100%	Rp 3.105.000.000	
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dishub	0	Rp 200.000.000	APBD		1	Rp 500.000.000	Dishub

			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 200.000.000	APBD		1	Rp 500.000.000	Dishub
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	Dishub	50	Rp 185.000.000	APBD		55	Rp 185.000.000	Dishub
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	Dishub	30	Rp 100.000.000	APBD		35	Rp 150.000.000	Dishub
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	20	Rp 75.000.000	APBD		20	Rp 35.000.000	Dishub
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	Dishub	100%	Rp 40.000.000	APBD		100%	Rp 50.000.000	Dishub

		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		1	Rp 50.000.000	Dishub
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang	Unit	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	4	Rp 40.000.000	APBD		0	Rp -	Dishub
		Penerbitan Izin Penyelenggara n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggara n dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	Dishub	1	Rp 198.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000	Dishub

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggara n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kot a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Dokume n	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kot a	Laporan	Dishub	1	Rp 198.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000	Dishub
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	Dishub	100%	Rp 1.830.000.000	APBD		100%	Rp 1.045.000.000	Dishub

			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	Dishub	2	Rp 1.750.000.000	APBD		1	Rp 750.000.000	Dishub
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklatJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	Orang	Dishub	0	Rp -	APBD		2	Rp 40.000.000	Dishub
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	Dishub	1000	Rp 30.000.000	APBD		1000	Rp 35.000.000	Dishub
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		1000	Rp 75.000.000	Dishub

			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		2	Rp	20.000.000	Dishub
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		1	Rp	25.000.000	Dishub
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Dishub	2	Rp	50.000.000	APBD		8	Rp	100.000.000	Dishub
1.2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Perairan			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	Dishub	100%	Rp	1.130.000.000	APBD		100%	Rp	1.050.000.000	Dishub

			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 50.000.000	APBD		1	Rp 60.000.000	Dishub
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	36	Rp 1.050.000.000	APBD		36	Rp 960.000.000	Dishub
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp 30.000.000	APBD		3	Rp 30.000.000	Dishub
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	APBD		100%	Rp 15.000.000	Dishub

			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
			Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000	Dishub
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/operasi gabungan	Dishub	2	Rp 50.000.000	APBD		2	Rp 50.000.000	Dishub

			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	2	Rp 50.000.000	APBD		2	Rp 50.000.000	Dishub
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 175.000.000	APBD		100%	Rp 175.000.000	Dishub
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub

			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	5	Rp 175.000.000	APBD		5	Rp 175.000.000	Dishub
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp -	APBD		100%	Rp -	Dishub
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub

			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub
--	--	--	--	--	---------	--------	---	----	---	------	--	---	----	---	--------

			Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	APBD		100%	Rp 15.000.000	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000	Dishub

			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	Dishub	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000	Rp -
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000	Dishub
	Sasaran 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	Dishub	100%	Rp 6.768.000.000	APBD		100%	Rp 8.852.500.000	Dishub
			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	APBD		100%	Rp 15.000.000	Dishub

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub
--	--	--	--	---	---------	---------------	---	----	---	-------------	--	---	----	---	--------

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggara n Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000	Dishub
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	15.000.000	APBD		100%	Rp	15.000.000	Dishub

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000	Dishub

			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 2.590.000.000	APBD		100%	Rp 1.100.000.000	Dishub
--	--	--	--	---	----------	---------------	-------------	-------------------------	-------------	--	-------------	-------------------------	---------------

			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp	10.000.000	APBD		1	Rp	10.000.000	Dishub
--	--	--	--	---	---------	---------------	---	----	------------	-------------	--	---	----	------------	--------

			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	12	Rp 2.580.000.000	APBD		12	Rp 1.090.000.000	Dishub
--	--	--	--	--	---------	---------------	----	------------------	-------------	--	----	------------------	--------

			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 25.000.000	APBD		100%	Rp 22.500.000	Dishub
			Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		1	Rp 12.500.000	Dishub

			Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		0	Rp	-	Dishub
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp	10.000.000	APBD		3	Rp	10.000.000	Dishub

			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	0%	Rp	-	APBD		100%	Rp	300.000.000	Dishub
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		1	Rp	300.000.000	Dishub

			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub
			Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	100%	Rp	700.000.000	APBD		100%	Rp	535.000.000	Dishub

			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	4	Rp 700.000.000	APBD		10	Rp 500.000.000	Dishub
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		2	Rp 25.000.000	Dishub

			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		1	Rp	10.000.000	Dishub
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub

			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	0	Rp	3.363.000.000	APBD		100%	Rp	6.805.000.000	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub

			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	Dishub	0	Rp	-	APBD		1	Rp	2.500.000.000	Dishub
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	3	Rp	2.368.000.000	APBD		4	Rp	800.000.000	Dishub
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lapora	Dishub	0	Rp	-	APBD		1	Rp	10.000.000	Dishub
			Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	Dishub	0	Rp	-	APBD		2	Rp	2.500.000.000	Dishub
			Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	Dishub	3	Rp	995.000.000	APBD		3	Rp	995.000.000	Dishub
			Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000	Dishub

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	Dishub
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000	Dishub
			Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000	Dishub

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000	Dishub

			Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -	Dishub

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000	Dishub
			Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000	Dishub

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD	0	Rp	-	Dishub
--	--	--	---	---	---------	---------------	---	----	---	-------------	---	----	---	---------------

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000	Dishub
JUMLAH TOTAL PERTAHUN								Rp 19.355.490.435				Rp 20.748.036.945	

Kuala Tungkal, Februari 2022



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001



BAB IV

KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

4.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaa Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, selanjutnya Renja Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

Kuala Tungkal, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001